OMBUDSMAN BABEL GELAR RAPAT AKSELERASI ADUAN, FOKUS SAJIKAN DATA FAKTUAL

Jum'at, 10 Juni 2022 - Agung Nugraha

Pangkalpinang - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan rapat Akselerasi Penerimaan dan Verifikasi Laporan bertempat di Hotel Fox Harris Pangkalpinang,Â Kamis (9/6/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronisasi data kuantitatif aduan yang masuk melalui Sistem Manajemen Penyelesaian LaporanÂ Ombudsman RI atau biasa disebut SimpeL 3.0 dan sistem PVL Cakep Administrasi Internal Ombudsman RI Babel atau disebut PVL Cikar.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa kegiatan penting yang akan dilaksanakan selama tiga hari ini bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin agar data aduan yang ter-*input* melalui sistem informasi dapat tersaji secara faktual.

"Berdasarkan Simpel 3, per tanggal 9 Juni 2022, Ombudsman RI Babel merupakan kantor perwakilan dengan aduan tertinggi di Indonesia dengan total sebanyak 715 aduan. Terhadap data tersebut masih ada selisih 40 aduan yang belum ter-*input* atau belum sinkron. Saya berharap hal ini akan selesai dalam kegiatan akselerasi, sembari kita akan berdiskusi banyak hal mengenai strategi mempermudah akses serta penyelesaian laporan masyarakat," ujar Yozar.

Selanjutnya Yozar menambahkan bahwa pada hari kedua kegiatan juga akan dilakukan Ombudsman Nampel (Nampung Pengaduan dan Laporan) dengan mengangkat tema "Aktualisasi Pendidikan Inklusif Melalui PPDB Tahun 2022"Â secara daring sekaligus *launching*Â posko pengaduan PPDB Tahun Ajaran Â 2022/2023.

"Besok kita juga akan mengagendakan kegiatan Ombudsman Nampel PPDB Inklusif dalam rangka mempermudah akses saudara kita penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan. Sehingga, kita harus mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Kita berharap melalui kegiatan Ombudsman Nampel ada pengaruh positif yang terjadi, seperti semua Pemerintah Kabupaten/Kota di Babel dapat lebih memperhatikan pendidikan inklusi walaupun secara kewenangan bukan ranah mereka. Namun, seperti yang kita ketahuiÂ sekolah dasar/menengah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tetap penting untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif di Babel," pungkas Yozar.